

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN**

**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, akhirnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023.

Sumedang, 11 Juli 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Sumedang



Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si

NIP. 19690212 198903 2 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.....	7
2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
BAB IV PENUTUP	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun". Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah." Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Bappppeda Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 serta Perubahan Pertama Renstra Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yang disebabkan oleh : (1) Adanya prioritas kegiatan yang mendorong tercapainya indikator utama

Pemerintahan Kabupaten Sumedang yaitu penurunan Stunting, Penanganan Kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023. Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Bappppeda Kabupaten Sumedang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Perubahan Renja Bappppeda kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
4. Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019;
  14. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
  15. Kepmendagri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 );
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur perencanaan Dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
  21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
  23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam

penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Bappppeda Kabupaten Sumedang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappppeda Kabupaten Sumedang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Bappppeda Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada perubahan RKPD Kabupaten Sumedang.
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappppeda Kabupaten Sumedang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappppeda kabupaten Sumedang Tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang akan dijelaskan kedalam empat bab, sebagai berikut :

BAB I.           Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang Pendahuluan atau Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Sumedang

BAB II.          Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Bab ini akan menguraikan tentang kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Bappppeda) sampai dengan triwulan II yang mengacu pada APBD tahun 2023

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV. Penutup

Bab ini akan menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik perhatian dalam tahapan pelaksanaan atau ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah dalam pelaksanaan, serta rencana tidak lanjutnya



## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappppeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur.
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi.
4. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan.
5. Layanan informasi tata ruang wilayah.
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappppeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan dari berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam hal Perencanaan.
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif.
3. Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah.
4. Meningkatnya Konsistensi antara dokumen Perencanaan dengan mekanisme penganggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappppeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat Substantif terkait Perencanaan.
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan.
3. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

## **2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II**

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang tahun sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcoma)/Keluaran Kegiatan(Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bapppeda) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan Renja 2023(n-1)		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Realisasi Capaian Target Renstra S.D Tahun 2023		Keterangan
	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Juni 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renja 2023 (%)										
	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4	11												
1					3		4		5		6		7	8=7/6	9=5+7	10=9/4	11
3	1	2			URUSAN PERENCANAAN												
01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan	100	persen	100	persen	100	persen					
01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	35	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	7	1	14	40	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	1	1	2	40	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	140	Berita Acara	28	Berita Acara	28	Berita Acara	28	1	56	40	

					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	1	1	2	40		
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2700	Usulan	540	Usulan	540	Usulan	540	1	1080	40		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	1	0,33	4	26,67		
01	02	2	02		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan berkategori Baik	15	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	1	0,33	4	26,67		
					Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5	Masukan	1	Masukan	1	Masukan	1	1	2	40		
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	140	Orang	28	Orang	28	Orang	28	1	56	40		
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	35	Buku	7	Buku	7	Buku	0	0	7	20		
01	02	2	03		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan</b>	<b>Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan berkategori Baik</b>	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	0	1	20		

					<b>Pembangunan Daerah</b>												
					Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan daerah	40	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	4	0,5	12	30	
<b>01</b>	<b>03</b>				<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>					
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Ketercapaian Target Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Berkategori Baik</b>	40	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	0		8	20	
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	0,5	3	30	
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	195	Perangkat Daerah	39	Perangkat Daerah	39	Perangkat Daerah	39	1	78	40	

01	03	2	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	2	0,5	6	30
01	03	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	20	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	2	0,5	6	30
01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	0,5	3	30
01	03	2	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	40	Perangkat Daerah	8	Perangkat Daerah	8	Perangkat Daerah	8	1	16	40
01	03	2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	40	Perangkat Daerah	8	Perangkat Daerah	8	Perangkat Daerah	8	1	16	40

01	03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	25	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	2	0,4	7	28
01	03	2	02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Ketercapaian Target Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA berkategori Baik</b>	40	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	0		8	20
01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	1	0,33	4	26,67
01	03	2	02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	35	perangkat Daerah	7	perangkat Daerah	7	perangkat Daerah	7	1	14	40
01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	35	perangkat Daerah	7	perangkat Daerah	7	perangkat Daerah	7	1	14	40

01	03	2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	40	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	0	0	8	20
01	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	1	0,33	4	26,67
01	03	2	02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	10	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	1	4	40
01	03	2	02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	10	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	1	4	40
01	03	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	10	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	1	0,5	3	30
01	03	2	03		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Target Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah berkategori Baik</b>	30	Lporan	6	Lporan	6	Lporan	0	0	6	20



01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	1	2	40
01	03	2	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	10	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	1	4	40
01	03	2	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	0	1	20
					<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>				
05	02	2	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	0	1	20
05	02	2	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	0	1	20
05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	0,5	3	30

05	02	2	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	0,5	3	30
05	02	2	02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	02	2	03		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan</b>	15	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	0	0	3	20
05	02	2	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	1	20
05	02	2	03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	02	2	03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	02	2	04		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi</b>	10	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	0	0	2	20
05	02	2	04		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	1	20
05	02	2	04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	0	1	20

Memperhatikan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 50% akan di lakukan skala prioritas untuk kegiatan yang mendorong dalam penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan peningkatan pendapatan keluarga. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2023, sehingga output-output kegiatan baru akan dicapai pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2023. Dapat disimpulkan capaian target kinerja program/kegiatan Renja Tahun 2023 akan tetap selaras dengan target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil terhadap hal tersebut diatas adalah tetap menjaga konsistensi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran dan melakukan penyesuaian/perubahan kerangka pendanaan Renja terutama terhadap target kinerja kegiatan yang telah terpenuhi namun alokasi anggarannya masih tersedia maupun penambahan alokasi anggaran pada target kinerja yang belum terlampaui melalui mekanisme pergeseran antar program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksana tugas teknis perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis perencanaan, dan pembinaan dibidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappppeda Kabupaten Sumedang didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas aparatur perencana.

2. Kurangnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
3. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran.
4. Belum efektifnya sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
5. Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan sebagai landasan perencanaan pembangunan.

Melihat permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappppeda Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappppeda dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Peran Bappeda sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sehingga produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.
2. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya perencana dengan berbekal keterbatasan jumlah sumber daya aparatur perencana.
3. Ketersediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi sangat menunjang dalam penyusunan produk-produk perencanaan
4. Keterpaduan database perencanaan
5. Masih adanya pemahaman sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dianggap formalitas.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Perubahan (RKPD-P) Tahun 2023 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD).

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Renja Bappppeda Tahun 2023, lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran. Perubahan anggaran tersebut dilakukan akibat adanya optimalisasi pengalokasian anggaran dalam mencapai target pembangunan, sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Sumedang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, adalah sebagaimana tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1.**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) PERUBAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Urusan Pemerintahan Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Alasan Penambahan Pagu/Penyesuaian Pagu	TAGGING Aktivitas Sub Kegiatan	Sumber Dana
			Tahun 2023	Pagu Rancangan Awal RENJA/RKPD	Pagu Rancangan RENJA/RKPD	Pagu Rancangan Akhir RENJA/RKPD	Jumlah (Rp)	Bertambah/Berkurang			
1	2	4	5	6	7	8	9 = 8	10 = 8- 7	11	12	13
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			29.041.544.890	29.091.544.890	30.396.893.339	30.396.893.339	1.305.348.449			
5.01	PERENCANAAN			27.194.044.890	26.789.044.890	27.594.393.339	27.594.393.339	805.348.449			
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	13.985.898.660	13.980.898.660	14.786.247.109	14.786.247.109	805.348.449			
		2. Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%								
		3. Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	100%								

		Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan									
		4. Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100%								
		5. Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100%								
		6. Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100%								
		7. Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100%								
		8. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100%								
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	360.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00	-			APBD
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	90.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	-			

5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-			
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-			
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-			
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-			
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-			
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>8.287.648.660,00</b>	<b>8.200.648.660,00</b>	<b>8.986.485.191</b>	<b>8.986.485.190,80</b>	<b>785.836.530,80</b>			<b>APBD, DAU</b>
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	8.197.648.660,00	8.110.648.660,00	8.896.485.190,80	8.896.485.190,80	<b>785.836.530,80</b>			
5.01.01.2.02.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-			



5.01.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-			
5.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	-			APBD
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-			
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-			
5.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>323.170.000,00</b>	<b>311.170.000,00</b>	<b>311.170.000,00</b>	<b>311.170.000,00</b>	-			APBD
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-			
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	61.170.000,00	61.170.000,00	61.170.000,00	61.170.000,00	-			

5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	12.000.000,00	-	-	-	-			
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>1.355.000.000,00</b>	<b>1.355.000.000,00</b>	<b>1.445.081.918,00</b>	<b>1.445.081.918,00</b>	<b>90.081.918,00</b>			<b>APBD</b>
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	265.081.918,00	265.081.918,00	<b>15.081.918,00</b>			
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	-			
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-			
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-			
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	28 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-			
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	-			
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	<b>75.000.000,00</b>			

5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>1.302.080.000,00</b>	<b>1.302.080.000,00</b>	<b>1.231.510.000,00</b>	<b>1.231.510.000,00</b>	<b>(70.570.000,00)</b>			<b>APBD</b>
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	304.430.000,00	304.430.000,00	304.430.000,00			
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	202.080.000,00	202.080.000,00	202.080.000,00	202.080.000,00	-			
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	(75.000.000,00)			
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)			
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>1.460.000.000,00</b>	<b>1.472.000.000,00</b>	<b>1.472.000.000,00</b>	<b>1.472.000.000,00</b>	<b>-</b>			<b>APBD</b>
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	-			
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-			
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	950.000.000,00	962.000.000,00	962.000.000,00	962.000.000,00	-			

5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	-			APBD
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-			
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-			
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			
01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan	100%	2.760.350.000,00	2.360.350.000,00	2.360.350.000,00	2.360.350.000,00	-			
01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	7 Laporan	1.526.000.000,00	1.526.000.000,00	1.526.000.000,00	1.526.000.000,00	-			APBD
01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	2 Dokumen	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	-			

	Strategis Pembangunan Daerah										
	- Penyusunan Dokumen Pagu Indikatif										
	- Analisis Kondisi Daerah (Gambaran Umum Daerah)										
	- Analisis Permasalahan Pembangunan										
	- Analisis Isu Strategis Pembangunan Daerah										
01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-			
	- Penelaahan Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota Tetangga										
01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-			
	- Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024										
01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-			
	- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024										

01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-			
	- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024										
01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	26 Usulan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-			
	- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024										
01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	-			
	- Penyusunan Dokumen Reviu RPJPD 2005-2025										
	- Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023			575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00				
	- Fasilitasi FDM (Forum Delegasi Musrenbang)										
	- Fasilitasi TAP										
	- Penyusunan RPJMD Transisi			300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00				
											<b>Fixed Cost</b>

01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Laporan	266.750.000,00	266.750.000,00	266.750.000,00	266.750.000,00	-			APBD
01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  - Verifikasi Data pada Aplikasi SIPD e-Database	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-		Fixed Cost	
01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD  - Operasional Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	28	74.250.000,00	74.250.000,00	74.250.000,00	74.250.000,00	-		Fixed Cost	
01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  - Penyusunan Profil Daerah (Semester 1 dan Semester 2)  - Buku Saku Indikator Makro, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Perempuan sebagai Kepala Keluarga, Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	7 Buku	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	-		Fixed Cost	

01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1 Laporan	967.600.000,00	567.600.000,00	567.600.000,00	567.600.000,00	-			APBD
01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	967.600.000,00	567.600.000,00	567.600.000,00	567.600.000,00	-			
	- Evaluasi RPJPD Tahun 2005 - 2025			100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100.000.000,00			Fixed Cost	
	- Evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2022			97.600.000	97.600.000	97.600.000,00	97.600.000,00				
	- Evaluasi RKPD Tahun 2022			150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	150.000.000,00			Fixed Cost	
	- Refleksi dan Resolusi Program Pembangunan			620.000.000	220.000.000	220.000.000,00	220.000.000,00			Fixed Cost	
	- Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah (Per Triwulan)										
01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Ketercapaian Target Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik	100%	10.447.796.230,00	10.447.796.230,00	10.447.796.230,00	10.447.796.230,00	-			
		2. Persentase Ketercapaian Target Program Perencanaan Pembangunan	100%								



		<b>Bidang Perekonomian dan SDA berkategori Baik</b>									
		<b>3. Persentase Ketercapaian Target Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkategori Baik</b>	<b>100%</b>								
<b>01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>2.690.750.000,00</b>	<b>2.690.750.000,00</b>	<b>2.690.750.000,00</b>	<b>2.690.750.000,00</b>	<b>-</b>			<b>APBD</b>
01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen								
	- Penyusunan Backgorund Studi RPJMD Kabupaten Sumedang 2024-2029 Bidang Pemerintahan			300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-			
	- Penyusunan RKPD Tahun 2024 Bidang Pemerintahan			175.000.000,00	140.750.000,00	140.750.000,00	140.750.000,00	-			
	- Analisis Pembangunan Kewilayahan			200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			
01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	39 Perangkat Daerah	110.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			

		Daerah Bidang Pemerintahan									
	- Asistensi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	235.950.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
	- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan								
	- Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan			200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			
	- Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan			90.400.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			

01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen								
	- Penyusunan Backgorund Studi RPJMD Kabupaten Sumedang 2024-2029 Bidang Pembangunan Manusia			500.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-			
	- Penyusunan RKPD Tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia			225.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	110.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
	- Asistensi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	169.400.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			

	- <i>Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>										
01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 laporan								
	- <i>Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia</i>			75.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			
	- <i>Sinergitas dan Harmonisasi Penanggulangan Kemiskinan</i>			75.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-		Fixed Cost	
	- <i>Sinergitas dan Harmonisasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat</i>			75.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			
	- <i>Sinergitas dan Harmonisasi Penurunan Stunting</i>			75.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-		Fixed Cost	
	- <i>Sinergitas dan Harmonisasi Pelaksanaan SPBS</i>			75.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-			
01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Laporan	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	-			APBD

01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen								<b>Fixed Cost</b>
	- <i>Fasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2023 - 2024</i>			500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		-		
	- <i>Fasilitasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2023</i>			180.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		-		
	- <i>Back Ground Study Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2023-2028</i>			500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		-		
01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  - <i>Asistensi dan verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	55.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		-		<b>Fixed Cost</b>

01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian - <i>Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	55.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-		Fixed Cost	
01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian - <i>Fasilitasi Perencanaan Pembentukan KEK Pariwisata Jatigede</i> - <i>Fasilitasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sumedang</i> - <i>Fasilitasi Perencanaan Pengembangan UMKM melalui Aplikasi Sistem Gerai UMKM Terpadu (SIMADU)</i> - <i>Fasilitasi Pelaksanaan TJSLP / PBL</i> - <i>Fasilitasi Penyusunan Proposal Kompetitif Provinsi Jawa Barat</i> - <i>Fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan Ripparda</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8 Laporan	165.000.000,00						Fixed Cost	
					500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-			
					100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
					50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-			
					50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-			
					25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-			
					25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-			

	- <i>Fasilitasi Komite Pemulihan Ekonomi Daerah</i>				25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-			
	- <i>Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah</i>				25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-			
01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen							<b>Fixed Cost</b>	
	- <i>Fasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Bidang SDA Tahun 2023 - 2024</i>			200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-			
	- <i>Fasilitasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Bidang SDA Tahun 2023</i>			200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
	- <i>Back Ground Study Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA Tahun 2023-2028</i>			700.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			
01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	55.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-		<b>Fixed Cost</b>	
	- <i>Asistensi dan verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>										

01.03.2.02.07	<p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</p> <p>- <i>Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDA</i></p>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	55.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-		Fixed Cost	
01.03.2.02.08	<p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</p> <p>- <i>Fasilitasi Perencanaan Kawasan Saint dan Teknologi Cilembu</i></p> <p>- <i>Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah</i></p>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan							Fixed Cost	
				200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			
				75.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-			
01.03.2.03	<p>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p>	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Laporan	4.817.046.230,00	4.817.046.230,00	4.817.046.230,00	4.817.046.230,00	-			APBD
01.03.2.03.02	<p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>- <i>Asistensi dan verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i></p>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-			



01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur <i>- Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP)</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	-		<b>fixed Cost</b>	
01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) <i>- Pemetaan (Peta Citra dan Peta Garis)</i> <i>- Verifikasi Geospasial</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1.850.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-		<b>Fixed Cost</b>	
01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan <i>- Asistensi dan verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-			
01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	2 Perangkat Daerah	1.917.046.230,00	1.917.046.230,00	1.917.046.230,00	1.917.046.230,00	-		<b>Fixed Cost</b>	

	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Renstra/Renja Bidang Kewilayahan									
	- Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumedang										
	- Updating dan Sosialisasi Aplikasi Openpet										
	- Reviu Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Sumedang										
	- Reviu Masterplan Persampahan Kabupaten Sumedang										
	- Identifikasi Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Sumedang										
01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-		Fixed Cost	
	- Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor										
05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>1.847.500.000,00</b>	<b>2.302.500.000,00</b>	<b>2.802.500.000,00</b>	<b>2.802.500.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>			

05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan	100%	1.847.500.000,00	2.302.500.000,00	2.802.500.000,00	2.802.500.000,00	500.000.000,00			
		2. Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi	100%								
05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	335.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-			APBD
05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	110.000.000,00	-	-	-	-			
05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan <i>- Kajian Data Makro</i>	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	225.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-			
05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Laporan	397.500.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-			APBD
05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	55.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			

	- Jasa Konsultansi Kajian Dampak Pelaksanaan Program Unggulan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumedang				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-		Fixed Cost	
	- Jasa Konsultansi Kajian Dampak Pelaksanaan Program Unggulan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumedang				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-		Fixed Cost	
05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	55.000.000,00	-	-	-	-			
05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	150.000.000,00	-	-	-	-			
05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	82.500.000,00	-	-	-	-			
05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	55.000.000,00	-	-	-	-			
05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			
	- Jasa Konsultansi Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Bupati Tahun 2023				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-		Fixed Cost	

	- Jasa Konsultansi Penyusunan Survey Mengukur Persepsi Terhadap Harapan Masyarakat pada Program Pembangunan di Kabupate Sumedang Tahun 2024			-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-		Fixed Cost	
05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Laporan	770.000.000,00	702.500.000,00	702.500.000,00	702.500.000,00	-			APBD
05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	440.000.000,00	-	-	-	-			
05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan  - Kajian Pembangunan Pertanian	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	137.500.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-			
05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan  - Kajian Perikanan Jatigede	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	-	152.500.000,00	152.500.000,00	152.500.000,00	-			
05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	137.500.000,00	-	-	-	-			
05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	1 Dokumen	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-			

		Pengembangan Perhubungan									
	- Kajian dampak pembangunan Jalan Tol Cisumdawu										
05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	55.000.000,00	-	-	-	-			
05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Laporan	345.000.000,00	1.050.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	500.000.000,00			APBD
05.02.2.04	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	220.000.000,00							
	- Apresiasi inovasi OPD tahunan (gelar inovasi)				250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-			Fixed Cost
	- Monev Roadmap SIDA				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			Fixed Cost
	- Pengukuran IPKD				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
	- Pengukuran IDSD				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
	- Pendampingan KUIB				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
	- Pendampingan IGA				200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-			
	- Pendampingan KIPP				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
	- Pendampingan PPD					200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			
	- Pendampingan IKKD					100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			

	- Pendampingan Lomba Inovasi Lainnya					200.000.000,00	200.000.000,00	<b>200.000.000,00</b>			
05.02.2.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			
	- Implementasi Hasil Inovasi										





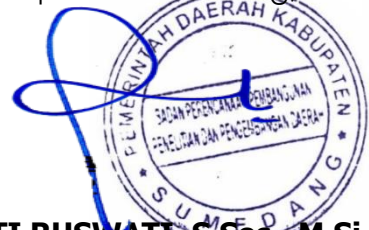
## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan sampai dengan Triwulan II Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ketiga, pertengahan periode renstra 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Bappppeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana perubahan ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan bagi Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan SKPD tahun 2023.

Sumedang, 11 Juli 2023

Kepala BAPPPEDA  
Kabupaten Sumedang,



**Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk I

NIP. 196902121989032005